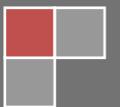




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020





Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang



Rencana Kinerja Tahunan(RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2020
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

Ir. Putu Dana

NIP.19611111 199303 1 005



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BABI Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan.....	4
BABII Rencana Kinerja Tahunan	5
2.1. Sasaran/Capaian Program.....	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja	6
BABIII Penutup	8

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadic / parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Tata Usaha
 2. Sub. Bagian Rumah Tangga



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - b. Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Akuntansi
 2. Sub. Bagian Verifikasi
 3. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Perundang-undangan
 2. Sub. Bagian Risalah
 2. Sub. Bagian Persidangan
 - d. Bagian Humas, Protokol dan Pengawasan terdiri :
 1. Sub. Bagian Pengawasan
 2. Sub. Bagian Humas dan Protokol
 3. Sub. Bagian Fasilitas Kerjasama dan Aspirasi



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah:

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran / Capaian Program

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran / Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja) , sedangkan sasaran



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 (Tahun ke-1).

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2020 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan)



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran...

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

SASARAN / CAPAIAN PROGRAM			Target/ Satuan	PROGRAM	KEGIATAN			Ket.			
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Uraian			Indikator Kinerja Keluaran	Anggaran (Rp)					
1	2	3			4	5	6		7	8	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dalam rangka menunjang kelancaran tugas DPRD ;	1.1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang diselesaikan	100%	1.1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	1.1	Terlaksananya 14 Kegiatan Aministrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang diselesaikan sesuai standar	12.861.329.875,00	APBD
							1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat keluar	97.626.075,00	
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	534.000.000,00	
							3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.000.000,00	
							4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	34.000.000,00	
							5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Administtrasi keuangan yg diselesaikan	351.022.000,00	
							6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pemeliharaan kebersihan kantor	318.000.000,00	
							7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	61.343.100,00	
							8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20.780.000,00	

					9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik yang tersedia	35.266.700,00	
					10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	291.264.000,00	
					11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	170.484.000,00	
					12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekwensi pemenuhan makanan dan minuman	1.206.344.000,00	
					13	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas rapat-rapat Kordinasi dan konsultasi ke luar/dalam Daerah	9.433.200.000,00	
					14	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani pemeliharaan kesehatannya	50.000.000,00	
1.2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	1.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.2	Terlaksananya 10 Kegiatan Sarana Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	2.375.635.700,00	APBD
					1	Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	220.000.000,00	
					2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000,00	
					3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	5.000.000,00	
					4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	99.000.000,00	
					5	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	525.083.400,00	
					6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihra	221.200.000,00	

						7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang rutin dipelihara	416.400.000,00		
						8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara berkala	684.952.300,00		
						9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	100.000.000,00		
						10	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	54.000.000,00		
2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng	2.1	Persentase Sumber daya aparatur yang disiplin aparturnya baik	100%	2.1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.1	Terlaksananya 4 Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Sumber daya aparatur yang disiplin aparturnya baik	352.750.000,00	APBD
							1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	164.250.000,00	
							2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Dprd dan PAW yang diadakan	81.000.000,00	
							3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang disediakan	67.500.000,00	
							4	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	40.000.000,00	
		2.2	Persentase peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	100%	2.2	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.2	Terlaksananya 4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDA	Persentase peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	1.675.993.325,00	APBD

						1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	127.777.725,00	
						2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	1.037.823.000,00	
						3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	134.350.000,00	
						4	Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Jumlah Pegawai yang dinilai sesuai SKP	376.042.600,00	
3	Meningkatnya Kualitas Sistem pelaporan capaian kinerja dan Penyusunan Program Anggaran Sekretariat DPRD	3.1	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	3.1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	3.1 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	208.860.000,00	APBD
						1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	208.860.000,00	
		3.2	Persentase perencanaan anggaran SKPD yang memiliki kualitas yang baik	100%	3.2	Program Perencanaan Anggaran Skpd	3.2 Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Anggaran Skpd	Persentase perencanaan anggaran SKPD yang memiliki kualitas yang baik	249.534.000,00	APBD
						1	Penyusunan Anggaran Skpd	Jumlah Dokumen Anggaran SKPD	249.534.000,00	

4	Meningkatnya kualitas fasilitasi rapat-rapat pembahasan produk hukum daerah	4.1	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda yang ditindak lanjuti menjadi perda	100%	4.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	4.1	Terlaksananya 7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda yang ditindak lanjuti menjadi perda	24.451.124.100,00	APBD
							1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang ditindak lanjuti menjadi Perda	2.665.185.700,00	
							2	Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Jumlah Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	22.048.000,00	
							3	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	296.100.000,00	
							4	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat-rapat Paripurna DPRD	218.920.000,00	
							5	Kegiatan Reses	Jumlah pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	2.775.670.000,00	
							6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	293.755.700,00	
							7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	18.179.444.700,00	
5	Meningkatnya layanan pemberitaan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan yang baik	5.1	Persentase peningkatan publikasi pembangunan, pemerintahan, fasilitasi kerjasama dan aspirasi masyarakat yang dilayani dengan baik.	100%	5.1	Program peningkatan layanan pemberitaan pembangunan, pemerintahan kemasyarakatan dan keprotokolan	5.1	Terlaksananya 3 Kegiatan peningkatan publikasi pembangunan, pemerintahan, fasilitasi kerjasama dan aspirasi masyarakat yang dilayani dengan baik.	Persentase Layanan pemberitaan pembangunan, pemerintahan kemasyarakatan dan keprotokolan yang dilayani dengan baik.	1.102.020.100,00	APBD

					1	Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan Media Massa	Jumlah Publikasi Pembangunan, pemerintahan, dan Kemasyarakatan dengan Media Masa	721.480.100,00	
					2	Pelaksanaan Jumpa Pers	Jumlah Jumpa Pers	110.182.700,00	
					3	Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Pelayanan Keprotokolan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD	270.357.300,00	

Singaraja, 02 Januari 2020
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

Ir. Putu Dana
NIP.19611111 199303 1 005